

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan, maka penulis mengambil kesimpulan terkait penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi reformasi birokrasi yang berada pada bidang penanaman modal Kota Batam yang sebelumnya berbentuk sebuah badan dan sekarang telah berbentuk dinas, bahwa Reformasi birokrasi merupakan hal penting dalam sebuah lembaga dan hal ini merupakan suatu kewajiban dalam birokrasi ataupun pemerintah dikarenakan untuk menghadapi perkembangan zaman (Thoha, 2017). Dalam hal ini ada 3 aspek yaitu;

Upsizing (Pembesaran), dalam hal pembesaran ini dapat disimpulkan jika pembesaran yang terjadi di bidang penanaman modal yang saat ini diurus oleh DPM-PTSP bahwasannya untuk struktur organisasi tidak adanya penambahan bidang ataupun bagian namun bidang ini mengalami perubahan dari badan menjadi dinas. Hal ini dikarenakan setelah dilakukan verifikasi sesuai Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 dengan hasil 1012 yang menandakan jika mendapat skor lebih dari 800 maka sebuah bidang dibentuk menjadi tipe A.

Reorganization (Penyusunan Kembali), Pemerintah Kota Batam ketika melakukan reformasi birokrasi mengubah bidang penanaman modal menjadi sebuah dinas dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadinya penyusunan kembali sebab tidak adanya pembentukan ataupun penambahan struktur yang menandakan tidak adanya pembentukan

kembali tugas pokok maupun fungsi yang ada. Hal ini di indikasikan karna ada beberapa faktor yaitu sumber daya manusia (SDM), anggaran (APBD) dan juga kekuasaan pemerintah daerah yaitu Walikota Kota Batam Bapak Muhammad Rudi S.E.

Merger (Pengelompokan), pengelompokan yang terjadi di DPM-PTSP ini telah terjadi sebelumnya ketika masih terbentuk menjadi badan. Pengelompokan bidang-bidang ini digabung dikarenakan ada indikasi dari faktor kesiapan sumber daya manusia dari segi jumlah dan kesiapan SDM yang ada, maka dengan hal ini bidang-bidang dikelompokkan. Namun pada idealnya untuk dinas bertipologi sesuai PP No. 18 tahun 2016 yaitu berjumlah 8 bidang tetapi tidak dengan hal ini DPM-PTSP memiliki 4 bidang saja.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi reformasi birokrasi yang terjadi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, yaitu; 1. Faktor Kekuasaan. Faktor ini mempengaruhi perubahan badan menjadi dinas di bidang penanaman modal dan PTSP karena, dalam hal ini ada indikasi pemerintah daerah yang menginginkan bidang ini untuk berbentuk sebuah dinas namun pemerintah daerah yang dipimpin oleh Walikota Kota Batam Muhammad Rudi S.E membuat kebijakan untuk tidak memperbesar struktur organisasi yang ada karena alasan SDM dan anggaran. 2. Faktor Sumber Daya Manusia yang merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dengan perubahan kelembagaan dari badan menjadi dinas di bidang penanaman modal dan PTSP karena kesiapan sumber daya manusia dalam bentuk jumlah

maupun kualitas sangat berpengaruh dengan terjadinya penambahan struktur yang berarti pembesaran atau *upsizing*. Pemerintah Kota Batam terlihat terkendala dengan tidak adanya kesiapan SDM yang bisa menangani hal-hal untuk menduduki jabatan yang baru. 3. Faktor Anggaran, dalam hal ini APBD sangat berpengaruh terhadap reformasi birokrasi. Faktor ini yang menyebabkan tidak terjadinya penambahan bidang-bidang yang ada di bidang penanaman modal yang telah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A. Keterbatasan anggaran ini yang menjadi salah satu faktor karena jika ditambahkan pejabat untuk menduduki bidang-bidang yang harusnya ditambah tentunya memerlukan anggaran yang cukup. 4. Faktor Kebijakan, Reformasi birokrasi/perubahan nomenklatur yang terjadi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang berlaku maupun itu dari pusat dan juga daerah. Ada beberapa aturan yang harus di implementasikan yaitu UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016 dan Permendagri No.100 Tahun 2016 lalu dilanjutkan dengan kebijakan daerah yaitu Perda Kota Batam No.10 Tahun 2016 yang membunyikan bentuk lembaga diikuti bentuk struktur di Perwako Kota Batam 56 Tahun 2016 dan Tugas pokok dan fungsi dalam Perwaku Kota Batam No 55 Tahun 2016.

B. Saran

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi reformasi birokrasi yang berada pada perubahan kelembagaan dari Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kota Batam, sebagai berikut;

1. Bagi Pemerintah Kota Batam

Peneliti menyarankan dan memberikan masukan untuk Pemerintah Kota Batam dalam hal ini membentuk bidang-bidang yang sesuai dengan idealnya dalam PP No. 18 Tahun 2016. Hal ini juga termasuk dalam kesiapan sumber daya manusianya (SDM) yaitu pejabat untuk dilakukan persiapan yang matang agar bisa menduduki segala bidang-bidang yang diperlukan dalam bentuk jumlah maupun kualitas.

2. Bagi Peneliti

Bagi peneliti diharapkan untuk lebih jauh dan kritis dalam melakukan suatu penelitian. Selain itu peneliti juga diharapkan untuk dapat lebih mendeskripsikan mengenai reformasi birokrasi atau perubahan kelambagaan pada objek penelitian.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menyempurnakan segala kekurangan yang ada di dalam penelitian ini dan juga dapat mengkaji reformasi birokrasi lebih baik lagi.